

LAPORAN LKPJ
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

No	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT
					6	7			PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					4,471,216,989.00	4,361,280,575.00			
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,346,532,489.00	3,251,771,614.00	Data dukung kinerja tidak lengkap / tidak tepat waktu	Rapat koordinasi triwulanan untuk review capaian kinerja dan serapan anggaran	Tidak ada rekomendasi DPRD
3		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	Dana	69,026,165.00	68,430,971.00	Data dukung kinerja tidak lengkap / tidak tepat waktu	Rapat koordinasi triwulanan untuk review capaian kinerja dan serapan anggaran	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	19.00	19.00			
				Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
3		Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input	Dana	2,697,034,701.00	2,620,254,059.00	Dokumen pendukung SPJ tidak lengkap/terlambat	Optimalisasi SIPD-RI Keuangan untuk penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	53.00	53.00			
				Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
3		PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 (Pengelolaan Kinerja ASN)	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input	Dana	77,200,000.00	76,800,000.00	Dokumen fisik/softfile pegawai belum lengkap; arsip belum tertata	Penataan dokumen kepegawaian	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100.00	100.00			
				Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
3		Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input	Dana	141,238,243.00	140,492,342.00	Kebutuhan sarpras belum terencana	Rapat koordinasi bulanan untuk evaluasi layanan administrasi dan perbaikan terus-menerus	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100.00			
				Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			

No	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT	
					6	7			PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3			Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMN/BMD) termasuk pengadaan	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input	Dana	33,987,100.00	30,828,000.00	Kebutuhan BMD tidak sesuai RKBMD/Renstra	Penyusunan RKBMD berbasis kebutuhan riil	Tidak ada rekomendasi DPRD
					Output	1.Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100	100.00			
					Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
3			Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	Dana	204,516,680.00	203,137,389.00	Kurangnya staf teknis (pejabat pengadaan barang jasa)	Bimtek PBJ untuk pejabat pengadaan/PPK	Tidak ada rekomendasi DPRD
					Output	1.Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100	100.00			
					Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
3			Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, pembinaan, pemakaian & pemeliharaan aset daerah	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	Dana	123,529,600.00	111,828,853.00	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada rekomendasi DPRD
					Output	1.Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80.00	80.00			
					Outcome	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	80.50	76.20			
2	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian		Permenkop UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, prosedur izin usaha dan kantor pelayanan	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			417,526,100.00	417,441,800.00	Kurangnya pemahaman pengurus koperasi dalam pengurusan izin usaha simpan pinjam, semakin rumitnya persyaratan usaha simpan pinjam (salah satunya modal minimal 500jt)	Pendampingan konsultasi koperasi untuk bantuan persiapan RAT, pembenahan laporan keuangan, dan penyusunan SOP internal	Tidak ada rekomendasi DPRD
3			Permenkop UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, prosedur izin usaha dan kantor pelayanan	1. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	417,526,100.00	417,441,800.00	Kurangnya pemahaman pengurus koperasi dalam pengurusan izin usaha simpan pinjam, semakin rumitnya persyaratan usaha simpan pinjam (salah satunya modal minimal 500jt)	Pendampingan konsultasi koperasi untuk bantuan persiapan RAT, pembenahan laporan keuangan, dan penyusunan SOP internal	Tidak ada rekomendasi DPRD
					Output	1.Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	69.25	100.00			
					Outcome	1.Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	7.50	13.98			

No	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT
					6	7			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Permenkop UKM No. 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (termasuk KSP/USP) ? dasar teknis pemeriksaan, checklist, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			31,201,000.00	29,747,544.00	Kurangnya SDM yang mengawasi	Pengawasan rutin	Tidak ada rekomendasi DPRD
3		Permenkop UKM No. 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (termasuk KSP/USP) ? dasar teknis pemeriksaan, checklist, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Input	Dana	31,201,000.00	29,747,544.00	Kurangnya SDM yang mengawasi	Pengawasan rutin	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi	34.89	54.04			
				Outcome	1.persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel	36.00	54.04			
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Permenkop UKM No. 10 Tahun 2022 tentang Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			13,353,700.00	13,169,335.00	Masih banyak koperasi belum memahami indikator & dokumen penilaian	Pemdampingan pemahaman KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) kepada pengurus koperasi	Tidak ada rekomendasi DPRD
3		Permenkop UKM No. 10 Tahun 2022 tentang Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	13,353,700.00	13,169,335.00	Masih banyak koperasi belum memahami indikator & dokumen penilaian	Pemdampingan pemahaman KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) kepada pengurus koperasi	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	4.29	3.11			
				Outcome	1.Persentase Koperasi Sehat	4.29	3.11			
5	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi tentang pembinaan dan pengembangan koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			72,735,000.00	71,595,802.00	Keterbatasan anggaran sehingga jumlah peserta/kelas pelatihan terbatas	Mendorong penggunaan modul digital	Tidak ada rekomendasi DPRD
3		UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi tentang pembinaan dan pengembangan koperasi	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	72,735,000.00	71,595,802.00	Keterbatasan anggaran sehingga jumlah peserta/kelas pelatihan terbatas	Mendorong penggunaan modul digital	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Output	1.Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	0.15	0.05			
				Outcome	1.Persentase koperasi dengan SDM terlatih	21.44	8.07			

No	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT
					6	7			PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Perbup No.37 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah daerah, Perbup No.71 Th.2024 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			80,056,000.00	79,124,921.00	Piutang sejak tahun 2002 yang sampai saat ini belum lunas	1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; 2. Penagihan melalui sarana elektronik; 3. Mendatangi langsung	Dinas koperasi, usaha mikro dan perindustrian melalui UPT Pengelola Dana Bergulir tetap melaksanakan penagihan terhadap piutang dana bergulir sesuai dgn ketersediaan SDM dan pembiayaan serta mengundang peminjam dana bergulir untuk diberikan arahan agar menyelesaikan pinjamannya. Selain itu juga terhadap beberapa piutang macet telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
3		UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop UKM terkait Pembinaan, Pengawasan & Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	80,056,000.00	79,124,921.00	Lemahnya perlindungan anggota terhadap risiko usaha, konflik internal, dan penyalahgunaan kewenangan	Mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa internal koperasi	
				Output	1.Persentase KUMKM yang mengakses fasilitasi pembiayaan	0.45	1.59			
				Outcome	1.Persentase peningkatan modal koperasi	6	6.38			
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			435,884,100.00	425,204,417.00	Banyak UMKM belum terdata valid, belum masuk Basis Data Nasional/OSS, sehingga sulit dibina	Pendataan terintegrasi: update database UMKM by name by address, by komoditas, by status legalitas, by kebutuhan pembinaan	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan akan meningkatkan pemanfaatan PLUT KUMKM dengan optimalisasi fungsi dan layanan PLUT berikut sarana dan prasarana didalamnya serta peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pengelola PLUT KUMKM dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kab. Pacitan. 2. Dinas Koperasi, Uaha Mikro dan Perindustrian Kab.Pacitan melalui PLUT KUMKM Kab. Pacitan memberikan fasilitasi pelayanan dan pendampingan secara intensif kepada pengusaha mikro di Kab.Pacitan agar berkembang dan meningkat usahanya
4		UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM, UU Cipta Kerja, sistem OSS-RBA untuk perizinan	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Input	Dana	435,884,100.00	425,204,417.00	Banyak UMKM belum terdata valid, belum masuk Basis Data Nasional/OSS, sehingga sulit dibina	Pendataan terintegrasi: update database UMKM by name by address, by komoditas, by status legalitas, by kebutuhan pembinaan	
				Output	1.Persentase Usaha Mikro yang dibina	2.82	2.85			
				Outcome	1.Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset	2.48	1.54			

